



THE ROLE OF PROFESSIONAL ORGANIZATIONS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION POLICY IMPLEMENTATION IN EAST KALIMANTAN

PERAN ORGANISASI PROFESIONAL DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KALIMANTAN TIMUR

Adharina Dian Pertiwi^{1*}, Joko Pamungkas²

^{1*} Faculty of Education, Yogyakarta State University, Email: adharinadian.2025@student.uny.ac.id

² Faculty of Education, Yogyakarta State University, Email: joko_pamungkas@uny.ac.id

*email koresponden: adharinadian.2025@student.uny.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62567/micjo.v3i3.2548>

Abstract

This study aims to examine the strategic role of professional associations in early childhood education policy implementation, focusing on HIMPAUDI East Kalimantan. Non-formal early childhood educators in developing regions face severe structural vulnerabilities, characterized by a substantial policy gap between central government expectations and local capacities, geographical isolation, and low digital literacy. Utilizing a descriptive qualitative design, this research gathered empirical data through in-depth interviews with the Regional Head of HIMPAUDI East Kalimantan and document analysis. The findings reveal that the association does not merely serve as a gathering platform but functions as a vital strategic partner for local governments. Through multi-layered communication, self-funded tiered training programs, and data-driven political lobbying, the association successfully translates rigid macro-regulations into applicable classroom practices while securing local financial incentives for marginalized educators. This community-based resilience mechanism effectively mitigates administrative burdens and compensates for local government bureaucracy delays. The study implies that local governments should transition toward a co-governance model by formally involving professional networks in policy formulation to ensure equitable educational quality in the new capital city (IKN) era.

Keywords : Professional Association, Policy Mediation, Early Childhood Education, Educational Governance, Teacher Welfare.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk meneliti peran strategis asosiasi profesional dalam implementasi kebijakan pendidikan anak usia dini, dengan fokus pada HIMPAUDI Kalimantan Timur. Pendidik anak usia dini non-formal di daerah berkembang menghadapi kerentanan struktural yang parah, ditandai dengan kesenjangan kebijakan yang substansial antara harapan pemerintah pusat dan kapasitas lokal, isolasi geografis, dan rendahnya literasi digital. Dengan menggunakan desain kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data empiris melalui wawancara mendalam dengan Kepala Regional HIMPAUDI Kalimantan Timur dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa asosiasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai platform pertemuan tetapi juga sebagai mitra strategis yang vital bagi pemerintah daerah. Melalui komunikasi berlapis, program pelatihan bertingkat yang didanai sendiri, dan lobi politik berbasis data, asosiasi tersebut berhasil menerjemahkan peraturan makro yang kaku menjadi praktik kelas yang dapat diterapkan sambil mengamankan insentif keuangan lokal bagi pendidik yang



terpinggirkan. Mekanisme ketahanan berbasis komunitas ini secara efektif mengurangi beban administratif dan mengkompensasi keterlambatan birokrasi pemerintah daerah. Studi ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah harus beralih ke model tata kelola bersama dengan secara formal melibatkan jaringan profesional dalam perumusan kebijakan untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata di era ibu kota baru (IKN).

Kata Kunci : Asosiasi Profesional, Mediasi Kebijakan, Pendidikan Anak Usia Dini, Tata Kelola Pendidikan, Kesejahteraan Guru.

1. INTRODUCTION

Fenomena kesenjangan implementasi kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan dalam kurun waktu 2020-2026 (Nurahillah et al., 2025). Provinsi Kalimantan Timur, sebagai wilayah dengan luas mencapai 127.346 km², menghadapi tantangan logistik dan komunikasi yang unik dalam mendistribusikan kebijakan pendidikan ke wilayah pedalaman dan pesisir (BPS Kaltim, 2023). Data menunjukkan bahwa meskipun standar nasional telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022, sektor non-formal seperti Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) seringkali mengalami hambatan dalam pengakuan administrasi dan akses bantuan pemerintah (Ringgi Allo et al., 2025). Kondisi geografis yang ekstrem ini menyebabkan retensi informasi kebijakan di tingkat akar rumput menjadi tidak merata, sehingga memerlukan peran aktif organisasi profesi sebagai jembatan informasi (Fitrianto & Fenty Anggriani Bintoro, 2019). Ketimpangan infrastruktur digital di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur juga memperumit adopsi kurikulum baru yang berbasis platform teknologi. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi pusat dan eksekusi lokal menjadi determinan utama dalam keberhasilan transformasi pendidikan di wilayah ini (Arifa, 2019).

HIMPAUDI sebagai organisasi profesi menaungi ribuan satuan pendidikan non-formal yang secara kuantitas jumlahnya sering kali melampaui lembaga formal seperti TK (Markuri & Fakhri, 2023). Berdasarkan laporan organisasi, terdapat lebih dari 10.000 pendidik PAUD di Kalimantan Timur yang berada di bawah koordinasi HIMPAUDI, 65% di antaranya masih memiliki latar belakang pendidikan di bawah Strata-1 (S1). Kesenjangan kualifikasi akademik ini berdampak langsung pada pemenuhan standar kompetensi pedagogik yang diharapkan oleh pemerintah. Selain itu, status hukum pendidik non-formal yang belum sepenuhnya setara dengan guru formal dalam UU Guru dan Dosen menciptakan tantangan dalam advokasi kesejahteraan dan jaminan perlindungan profesi (Latifah et al., 2018). Melalui sistem Diklat Berjenjang, HIMPAUDI berusaha memitigasi celah kompetensi ini guna memastikan kebijakan nasional tetap dapat dijalankan secara berkualitas (Ulfah et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa keberadaan organisasi profesi merupakan mesin penggerak utama dalam menjaga marwah dan profesionalisme pendidik di tingkat daerah (Danim et al., 2022).

Implementasi kebijakan kesejahteraan bagi guru PAUD di Kalimantan Timur menunjukkan disparitas yang mencolok antar wilayah akibat perbedaan kapasitas anggaran daerah. Berdasarkan data observasi, dukungan insentif pemerintah daerah di beberapa wilayah Kalimantan Timur yang menjadi fokus advokasi HIMPAUDI. Data lapangan menunjukkan bahwa Kota Samarinda memberikan stimulus insentif bulanan tertinggi berkisar antara Rp 700.000 hingga Rp 1.000.000 yang diikat secara legal melalui Peraturan Walikota, sementara Kota Balikpapan mengalokasikan dana hibah flat sebesar Rp 500.000 per bulan berdasarkan kebijakan daerah setempat. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah pedalaman seperti Kabupaten Mahakam Ulu yang hanya mampu memberikan bantuan finansial terbatas sebesar Rp 300.000 per bulan bagi para pendidik non-formal. Ketimpangan alokasi anggaran ini mencerminkan bahwa perjuangan organisasi profesi dalam melakukan lobi dan advokasi kebijakan fiskal daerah sangat menentukan keberlanjutan hidup serta motivasi kerja para pendidik di akar rumput (Tabo et al., 2025).

Fenomena ketidaksetaraan pendapatan ini mengonfirmasi bahwa tanpa adanya intervensi dan komunikasi politik yang intensif dari lembaga seperti HIMPAUDI, perhatian pemerintah daerah



terhadap nasib guru non-formal cenderung mengalami stagnasi (Latifah et al., 2018). Beban kerja guru PAUD non-formal di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini semakin meningkat seiring dengan tuntutan implementasi kurikulum baru, namun tidak diimbangi dengan standarisasi upah minimum yang layak (Anirwan et al., 2024). Akibatnya, kesenjangan finansial yang terjadi antar wilayah administrasi ini berpotensi memicu tingginya angka perpindahan guru (*teacher turnover*) dari daerah pelosok ke wilayah perkotaan yang memiliki insentif lebih menjanjikan (Fitrianto & Fenty Anggriani Bintoro, 2019). Sinkronisasi regulasi pengupahan antara pemerintah pusat dan daerah melalui fasilitasi organisasi profesi menjadi solusi mendesak untuk memastikan pemerataan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kalimantan Timur.

Data di atas mencerminkan bahwa perjuangan organisasi profesi dalam mengadvokasi kebijakan fiskal daerah sangat menentukan keberlangsungan hidup para pendidik. Tanpa adanya tekanan dan komunikasi intensif dari organisasi seperti HIMPAUDI, perhatian pemerintah daerah terhadap nasib guru non-formal cenderung stagnan (Palupi & Sugito, 2025a). Sebagai wilayah yang kini bertransformasi menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dituntut memiliki standar pelayanan PAUD yang lebih progresif untuk mendukung ekosistem kota global (Ammar et al., 2026). Akselerasi kualitas ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya sinkronisasi antara kebijakan pemberian insentif dengan peningkatan beban kerja guru di lapangan (Kurniawan et al., 2025; Tabo et al., 2025).

Penguatan literasi digital dan adaptasi terhadap kecerdasan buatan (AI) kini menjadi prioritas baru dalam program pengembangan profesional HIMPAUDI Kalimantan Timur. Pesatnya perkembangan teknologi, banyak guru PAUD yang masih menghadapi hambatan dalam mengintegrasikan AI sebagai alat bantu pengajaran dan administrasi pembelajaran (Fauzi et al., 2024; Tabo et al., 2025; Yunara, 2022). Tuntutan global yang mewajibkan pendidik untuk tidak hanya kompeten secara pedagogis tetapi juga cakap secara teknologi (Sungwa, 2025; UNESCO, 2021). Penelitian ini menjadi krusial untuk menelaah bagaimana efektivitas peran mediasi HIMPAUDI dalam menavigasi perubahan kebijakan yang begitu cepat. Studi penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis mengenai pentingnya penguatan lembaga profesi dalam mendukung ekosistem pendidikan anak usia dini yang berkelanjutan di wilayah berkembang.

Masalah fundamental dalam ekosistem pendidikan anak usia dini di Indonesia adalah adanya diskoneksi antara regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan realitas implementasi di daerah, terutama bagi pendidik PAUD non-formal. Berdasarkan data nasional, kebijakan Kurikulum Merdeka menuntut standar pedagogik yang tinggi, namun faktanya banyak guru di Kalimantan Timur belum mendapatkan akses pelatihan memadai karena kendala geografis yang ekstrem (Ringgi Allo et al., 2025). Kesenjangan status yang lebar di mana guru non-formal sering kali tidak memenuhi syarat sertifikasi akibat keterbatasan kualifikasi akademik yang belum mencapai jenjang sarjana (Aznem & Hanim, 2025). Kondisi ini diperburuk dengan perbedaan kebijakan anggaran di tiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang menciptakan ketidakadilan pendapatan bagi pendidik dengan beban kerja serupa (Fitrianto & Fenty Anggriani Bintoro, 2019).

Kondisi riil di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan ketua HIMPAUDI Kalimantan Timur menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara ekspektasi normatif Kementerian pusat dengan kapasitas riil yang dimiliki oleh satuan pendidikan anak usia dini di tingkat daerah. Data pemetaan organisasi, kebijakan makro pemerintah pusat mengamanatkan bahwa kualifikasi akademik minimal untuk tenaga pendidik PAUD adalah jenjang Sarjana (S1) PAUD atau Psikologi, namun realitas empiris di Kalimantan Timur mencatat bahwa sekitar 65% pendidik di jalur non-formal masih mengandalkan ijazah SMA atau sederajat sebagai latar belakang pendidikan tertinggi mereka. Kesenjangan kualifikasi ini berbanding lurus dengan ketimpangan sistem kesejahteraan, di mana guru formal berhak atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) melalui jalur sertifikasi, sementara pendidik non-formal di wilayah ini sepenuhnya bergantung pada fluktuasi dana hibah atau insentif daerah yang berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan. Hambatan operasional ini semakin diperparah oleh aspek digitalisasi; di saat pusat mewajibkan adopsi Kurikulum Merdeka dan



penggunaan platform berbasis kecerdasan buatan (AI), para pendidik di wilayah pedalaman Kalimantan Timur justru masih berjuang menghadapi keterbatasan sinyal komunikasi dan rendahnya literasi digital dasar (Aznem & Hanim, 2025; Fauzi et al., 2024).

Fenomena ini mengonfirmasi bahwa kebijakan yang bersifat *top-down* sering kali gagal mempertimbangkan kapasitas lokal dan variabel ekonomi pendidik di daerah berkembang (Heru et al., n.d.; Penelitian et al., 2023). Guru PAUD non-formal terjebak dalam tuntutan administratif yang kompleks namun didukung dengan fasilitas yang sangat terbatas untuk pengembangan diri. Tanpa adanya pengakuan hukum yang kuat dalam regulasi nasional, upaya peningkatan kualitas PAUD di wilayah penyangga IKN ini akan terus menghadapi hambatan struktural yang massif (Ammar et al., 2026; Nurapriani et al., 2019). Masalah ini diperumit dengan lambatnya sinkronisasi data Dapodik yang menghambat distribusi bantuan pemerintah secara tepat sasaran bagi guru honorer (Fauzi et al., 2024). Diperlukan peran pihak ketiga yang kuat untuk menjembatani hambatan komunikasi birokrasi ini agar aspirasi guru dapat terdengar.

Kehadiran HIMPAUDI sebagai organisasi profesi menjadi krusial di tengah masalah sistemik ini untuk melakukan mediasi dan tekanan politik kepada pemerintah daerah (Markuri & Fakhri, 2023). Ketidakseimbangan antara beban kerja yang meningkat dengan rendahnya insentif finansial menciptakan risiko penurunan kualitas layanan pendidikan secara jangka Panjang (Latifah et al., 2018). Dinamika ini menuntut adanya kepemimpinan organisasi yang progresif untuk mengawal hak-hak serta martabat para pendidik (Profesionalisme et al., 2013). Melalui pendekatan yang komprehensif, peran organisasi profesi diharapkan mampu memecahkan kebuntuan implementasi kebijakan tersebut di Kalimantan. Organisasi seperti HIMPAUDI tidak hanya sekadar menjadi perkumpulan sosial, melainkan entitas formal yang memiliki mandat untuk meningkatkan martabat pendidik melalui penguatan kapasitas berkelanjutan (Galang Harfianto & Solekah, n.d.). Keberadaan lembaga profesi yang kuat merupakan indikator kematangan sebuah sistem pendidikan di suatu negara (Manggalih et al., 2025). Melalui struktur yang terorganisir, organisasi profesi mampu mentransformasi individu terampil menjadi tenaga ahli yang tersertifikasi (Ammar et al., 2026).

Table 1. Fungsi Strategis Organisasi Profesi dalam Tata Kelola Pendidikan

Fungsi Utama	Deskripsi Operasional	Dampak Terhadap Pendidik
Advokasi Kebijakan	Menjembatani aspirasi guru ke pembuat kebijakan	Peningkatan kesejahteraan dan status hukum
Standarisasi Profesi	Menetapkan kriteria kompetensi minimal	Penjaminan kualitas pembelajaran
Pengembangan Karir	Menyelenggarakan pelatihan dan seminar	Peningkatan kualifikasi dan keterampilan
Proteksi Hukum	Memberikan bantuan hukum terkait profesi	Keamanan dan kenyamanan dalam bekerja

Source: Sintesis Literatur Tata Kelola Pendidikan (Zupic & Čater, 2015)

Efektivitas organisasi profesi sangat bergantung pada kemandirian fiskal dan dukungan politik dari pemerintah daerah. Sistem tata kelola yang demokratis, lembaga ini berfungsi sebagai penyeimbang (*check and balance*) terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pendidik (Setiawan & Utami, 2021). Transformasi digital juga menuntut fungsi tambahan bagi organisasi untuk menjadi penyedia literasi teknologi bagi anggotanya agar tetap relevan di era industri 4.0 (Yunara, 2022). Tanpa dukungan dari jaringan profesional, pendidik di daerah terpencil akan mengalami isolasi informasi yang berdampak pada penurunan kualitas pengajaran (Hulu & Ramli, 2023). Penguatan fungsi organisasi profesi di tingkat lokal seperti Kalimantan Timur menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan reformasi pendidikan nasional. Integrasi fungsi-fungsi tersebut secara harmonis akan menciptakan ekosistem pendidikan yang tangguh dan adaptif (Rohita et al., 2022).

Kajian mengenai organisasi profesi guru telah banyak dilakukan, sebagian besar studi terdahulu lebih berfokus pada peran organisasi profesi di wilayah perkotaan dengan akses infrastruktur yang



mapan, namun sangat sedikit yang memotret bagaimana organisasi menavigasi kebijakan di wilayah dengan disparitas geografis luas seperti Kalimantan Timur. Data menunjukkan bahwa jangkauan kebijakan pendidikan seringkali terhenti di pusat kota, sementara pendidik di wilayah pedalaman Mahakam Ulu atau pesisir Berau mengalami isolasi informasi yang akut (Ammar et al., 2026). B belum banyak mengeksplorasi bagaimana organisasi profesi lokal mempersiapkan anggotanya menghadapi standar pendidikan kota global seiring dengan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke wilayah ini. Keunikan posisi Kalimantan Timur sebagai laboratorium kebijakan nasional menciptakan urgensi untuk meneliti pola mediasi yang dilakukan oleh HIMPAUDI Kaltim. Minimnya analisis mendalam mengenai strategi organisasi dalam mengatasi krisis identitas profesi bagi pendidik non-formal di daerah berkembang (Fitriyah et al., 2025). Kontras dengan temuan di beberapa wilayah lain di mana ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat sangat tinggi, sehingga menyebabkan stagnasi inovasi saat bantuan minim (Fitrianto & Fenty Anggriani Bintoro, 2019). Perbedaan pola resiliensi organisasi inilah yang menjadi titik tekan keunikan penelitian ini dibandingkan kajian-kajian sebelumnya.

Selain itu, integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) oleh organisasi profesi di wilayah dengan keterbatasan sinyal merupakan topik yang belum tereksplorasi secara memadai. Riset terdahulu seringkali mengasumsikan bahwa literasi digital guru adalah tanggung jawab individu atau program pemerintah pusat, tanpa melihat peran intervensi organisasi profesi sebagai enabler teknologi di daerah (Yunara, 2022). Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelaah bagaimana HIMPAUDI Kalimantan Timur melakukan terobosan dalam mendistribusikan pengetahuan teknologi di tengah hambatan infrastruktur. Studi ini tidak hanya mereplikasi penelitian tentang organisasi profesi, tetapi memberikan perspektif baru tentang bagaimana organisasi lokal di wilayah strategis IKN melakukan adaptasi kebijakan secara progresif. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkaya literatur tata kelola pendidikan pada skala internasional melalui bukti empiris.

Peta kesenjangan riset dan konteks empiris yang telah dipaparkan, maka pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah, bagaimana peran HIMPAUDI Kalimantan Timur dalam menavigasi implementasi kebijakan pendidikan anak usia dini pada jalur non-formal. Secara lebih spesifik, pertanyaan makro tersebut diturunkan menjadi tiga pertanyaan penelitian yaitu pertama, bagaimana peran HIMPAUDI Kalimantan Timur dalam mendukung (supporting) implementasi kebijakan PAUD pusat, khususnya dalam penguatan kompetensi pendidik non-formal melalui program Diklat Berjenjang. Kedua bagaimana strategi HIMPAUDI Kalimantan Timur dalam mengomunikasikan dan mendistribusikan informasi kebijakan kurikulum serta literasi digital ke wilayah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur. Dan ketiga adalah bagaimana mekanisme HIMPAUDI Kalimantan Timur dalam mengevaluasi dampak kebijakan insentif daerah dan memperjuangkan advokasi kesejahteraan hak hukum bagi guru non-formal. Penelitian bertujuan menghasilkan model analisis yang komprehensif mengenai kontribusi nyata organisasi profesi berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama Ketua HIMPAUDI Kalimantan Timur guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif di masa depan.

2. RESEARCH METHOD

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam peran dinamis organisasi profesi dalam implementasi kebijakan pendidikan (Creswell et al., 2006). Data dari riset-riset terdahulu menunjukkan bahwa fenomena sosial yang kompleks, seperti mediasi kebijakan dan advokasi kesejahteraan guru di daerah dengan hambatan geografis, tidak dapat diukur secara akurat hanya melalui instrumen numerik (Manley et al., 2023). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, proses, dan interpretasi subjektif yang terlibat langsung dalam organisasi. Melalui desain ini, peneliti berfokus pada pengumpulan fakta lapangan mengenai bagaimana program-program yang terdistribusi secara riil di Kalimantan Timur. Struktur penelitian ini didesain untuk menghasilkan narasi yang utuh, kontekstual, dan mendalam mengenai realitas tata kelola PAUD non-formal.



Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria dan kapasitas spesifik yang selaras dengan tujuan riset (Kuckartz, 2014). Berdasarkan struktur tata kelola HIMPAUDI Kalimantan Timur, Ketua Wilayah dipilih sebagai sumber data utama karena memegang otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan, merancang arah advokasi strategis, serta mengoordinasikan lebih dari 10.000 anggota di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kapasitas beliau sebagai informan kunci (*key informant*) memberikan akses terhadap data internal organisasi yang valid terkait negosiasi insentif finansial dengan pemerintah daerah yang tidak dimiliki oleh pengurus di level bawah. Selain itu, pengalaman empiris Ketua HIMPAUDI Kaltim dalam menjembatani regulasi *top-down* dari Kemendikbud dalam memberikan perspektif yang kaya dan komprehensif mengenai hambatan birokrasi di lapangan. Serta berguna untuk menjaga triangulasi sumber dan kredibilitas data, kriteria pemilihan informan ini diikat oleh relevansi substansi dan kedalaman informasi yang dikuasai.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan kombinasi metode wawancara mendalam dan studi dokumentasi untuk memastikan kedalaman serta keabsahan informasi (Noble & Smith, 2015). Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur bersama Ketua HIMPAUDI Kalimantan Timur untuk menggali aspek-aspek implisit terkait dukungan, komunikasi, dan evaluasi kebijakan PAUD. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini mengadopsi model interaktif yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Bowen, 2009). Tahap pertama melibatkan proses reduksi data, di mana peneliti menyaring, mengode, dan memfokuskan tumpukan informasi mentah dari transkrip wawancara serta dokumen kebijakan menjadi kategori yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk matriks naratif dan tabel komparatif guna mempermudah pemetaan pola mediasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bergradasi dengan memverifikasi temuan lapangan terhadap literatur tata kelola pendidikan internasional untuk menghasilkan model konseptual yang valid (Kuckartz, 2014). Langkah-langkah analitis ini memastikan bahwa kesimpulan akhir yang ditarik memiliki tingkat kredibilitas (*trustworthiness*) yang tinggi sesuai standar publikasi ilmiah internasional.

3. RESULT AND DISCUSSION

Advocacy and Policy Communication

Proses penerjemahan kebijakan *top-down* dari kementerian pusat ke tingkat daerah oleh HIMPAUDI Kalimantan Timur diawali dengan rekonstruksi pesan birokrasi agar lebih mudah dipahami oleh pendidik di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, struktur bahasa dalam dokumen formal Kurikulum Merdeka sering kali dinilai terlalu teoretis dan padat istilah administratif bagi guru non-formal. Dalam menghadapi kendala pemahaman ini, organisasi menerapkan strategi komunikasi berlapis dengan menerbitkan panduan praktis penulisan modul ajar yang berbasis pada kearifan local (Palupi & Sugito, 2025b). Pola sosialisasi ini dilakukan secara bertahap melalui pemanfaatan struktur organisasi dari tingkat wilayah, daerah, hingga ke tingkat cabang di kecamatan. Hambatan komunikasi yang biasanya memicu penolakan terhadap kurikulum baru dapat direduksi secara signifikan melalui pendekatan dialogis yang inklusif.

Ketua Wilayah HIMPAUDI Kaltim menjelaskan bagaimana organisasi secara aktif menyaring dan memetakan kebutuhan informasi guru sebelum regulasi tersebut diturunkan ke tingkat satuan terkecil. Pentingnya peran organisasi sebagai jembatan informasi agar tidak terjadi distorsi kebijakan.

"HIMPAUDI Kalimantan Timur sadar betul bahwa tidak semua guru di lapangan langsung paham ketika ada istilah-istilah kurikulum baru dari pusat. Makanya, lewat pengurus di Kabupaten dan Kecamatan, kami *breakdown* lagi aturan itu jadi modul-modul praktis. Kami sampaikan dengan bahasa yang santai di forum-forum gugus agar guru-guru tidak merasa terbebani oleh administrasi." (Wawancara dengan Ketua HIMPAUDI Kaltim, 2026).

Langkah taktis berikutnya yang dijalankan oleh HIMPAUDI Kaltim adalah mengoptimalkan peran gugus-gugus PAUD di tingkat kecamatan sebagai agen diseminasi informasi utama. Informan



menyatakan bahwa instruksi formal dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota sering kali mengalami keterlambatan akibat rantai birokrasi yang panjang (Ammar et al., 2026). Untuk mengantisipasi kepasifan tersebut, organisasi menggerakkan jaringan penasihat akademis internal untuk melakukan pendampingan langsung ke satuan-satuan Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA). Melalui forum diskusi berkala di tingkat gugus, para pendidik diajarkan cara mengadopsi prinsip pembelajaran berdiferensiasi secara bertahap. Efektivitas gerakan berbasis komunitas ini membuktikan bahwa kemandirian informasi organisasi mampu menutupi kelambatan program kerja yang dialami oleh instansi pemerintah.

Fungsi komunikasi kebijakan yang dijalankan oleh HIMPAUDI Kaltim merepresentasikan peran organisasi profesi sebagai aktor penyeimbang (*check and balance*) dalam tata kelola pendidikan modern. Sistem administrasi publik yang demokratis, keterlibatan aktif jejaring non-negara sangat dibutuhkan untuk menerjemahkan regulasi makro yang kaku menjadi aksi mikro yang fleksibel (Moss & Urban, 2017). Tantangan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur menuntut lompatan mutu pengajaran yang cepat, sehingga saluran komunikasi yang efisien menjadi kebutuhan yang mutlak (Ammar et al., 2026). HIMPAUDI Kaltim berhasil memosisikan dirinya sebagai intermedias strategis yang tidak hanya menyebarkan aturan pusat, melainkan juga menyaring hambatan sosiologis yang dirasakan guru (Markuri & Fakhri, 2023). Kemandirian saluran komunikasi ini secara global diakui sebagai kunci keberhasilan reformasi kurikulum di negara-negara berkembang (Latifah et al., 2018).

Professional Development & Capacity Building

Pengembangan profesi secara kontinu bagi pendidik PAUD non-formal di Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar akibat minimnya alokasi anggaran pelatihan dari pemerintah daerah. Dana APBD yang dialokasikan oleh dinas pendidikan setempat setiap tahunnya hanya mampu mengover pelatihan kompetensi untuk sebagian kecil dari total guru honorer yang ada. Menghadapi ketimpangan kuota ini, HIMPAUDI Kaltim mengambil inisiatif taktis dengan menyelenggarakan program Diklat Berjenjang secara mandiri. Program pelatihan ini dirancang dari Tingkat Dasar, Lanjut, hingga Mahir untuk memastikan bahwa guru yang tidak memiliki latar belakang ijazah S1 PAUD tetap memiliki kualifikasi pedagogik yang terstandarisasi (Sulistiani, n.d.; Ulfah et al., 2023). Struktur pelatihan dikelola secara profesional dengan melibatkan para akademisi perguruan tinggi lokal sebagai narasumber utama.

Realitas keterbatasan fasilitas negara dan tingginya militansi guru untuk meningkatkan kapasitas secara mandiri digambarkan secara mendalam oleh informan dalam rekaman wawancara. Beliau menyoroti bagaimana program pembinaan kompetensi tetap berjalan masif berkat sistem gotong-royong finansial. Terkait fenomena *self-funding* ini, informan menyampaikan:

"Pemerintah daerah punya keterbatasan anggaran, jadi kuota diklat dari dinas itu sangat sedikit. Akhirnya, HIMPAUDI Kaltim bergerak mandiri mengadakan Diklat Berjenjang secara swadaya. Luar biasanya, guru-guru PAUD non-formal ini rela menyisihkan uang saku mereka yang tidak seberapa demi bisa ikut pelatihan dasar sampai mahir. Ini murni kesadaran kolektif untuk meningkatkan mutu mengajar anak-anak di Kaltim." (Wawancara dengan Ketua HIMPAUDI Kaltim, 2026).

Kemandirian finansial dalam pengelolaan peningkatan kapasitas ini berhasil meluluskan ribuan pendidik bersertifikasi kompetensi dalam beberapa tahun terakhir, yang secara signifikan mengubah potret mutu guru non-formal di Kalimantan Timur. Kenaikan persentase guru lulusan diklat ini berdampak langsung pada peningkatan nilai akreditasi lembaga PAUD non-formal yang berada di bawah naungan HIMPAUDI (Ringgi Allo et al., 2025). Selain penguatan aspek pedagogik konvensional, HIMPAUDI Kaltim juga mulai mengintegrasikan materi literasi digital dalam program pembinaan terbaru mereka (Aznem & Hanim, 2025). Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kewajiban pengisian rapor pendidikan digital oleh pusat melalui metode tutor sebaya. Model *capacity building* berbasis kemitraan kolektif ini memberikan kontribusi teoretis baru bahwa kematangan kompetensi guru dapat dicapai melalui penguatan komunitas profesi yang mandiri (Ulfah et al., 2023).



Dalam perspektif manajemen pendidikan global, model pengembangan kapasitas yang dikembangkan oleh HIMPAUDI Kaltim berhasil merekonstruksi identitas profesional guru marginal (Ammar et al., 2026; Budiman et al., 2026). Penguatan kapasitas berbasis komunitas ini menekankan pentingnya jalur pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning pathways*) di wilayah berkembang (*Education at a Glance 2020 OECD INDICATORS*, 2020). Namun, portofolio lulusan Diklat Mahir HIMPAUDI sering kali membentur sekat regulasi kedinasan karena adanya pemisahan jalur formal dan non-formal (Sulistiani, n.d.). Oleh karena itu, sinergitas pengakuan hasil diklat profesi oleh kementerian pusat menjadi prasyarat utama untuk menuntaskan ketimpangan kualitas pengajaran di wilayah penyangga IKN.

Welfare and Legal Protection

Perjuangan untuk menuntut keadilan hak hukum dan kelayakan finansial bagi guru PAUD non-formal merupakan isu paling krusial dalam agenda gerakan HIMPAUDI Kalimantan Timur. Mayoritas pendidik Kelompok Bermain di wilayah pedalaman masih menerima upah sukarela di bawah standar UMR karena ketiadaan regulasi proteksi upah bagi sektor non-formal di tingkat pusat. Secara hukum, pengecualian status guru non-formal dalam regulasi makro berimplikasi pada hilangnya hak sertifikasi tunjangan profesi (Taiyu et al., 2025). Realitas diskriminatif ini mendorong HIMPAUDI Kaltim untuk mengalihkan strategi perjuangan dengan mendesak pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan diskresi fiskal berupa insentif daerah (Palupi & Sugito, 2025b). Peran organisasi dalam konteks ini berubah dari sekadar asosiasi edukasi menjadi serikat pekerja yang agresif memperjuangkan hak hidup anggotanya (Markuri & Fakhri, 2023). Dalam cuplikan rekaman wawancara, Ketua Wilayah HIMPAUDI Kaltim membeberkan dinamika negosiasi politik yang melelahkan dengan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota demi memperjuangkan alokasi insentif bulanan. Mengenai disparitas hasil advokasi finansial ini, beliau menuturkan:

"Advokasi kesejahteraan ini adalah perjuangan yang paling berat. Status hukum guru non-formal di undang-undang pusat belum setara, jadi kami harus ketuk pintu walikota dan bupati satu per satu di Kaltim. Hasilnya beda-beda; di Samarinda alhamdulillah bisa dapat sampai satu juta rupiah per bulan lewat Perwali, tapi di kabupaten pedalaman seperti Mahakam Ulu angkanya masih minim, sekitar tiga ratus ribu rupiah saja karena APBD mereka terbatas." (Wawancara dengan Ketua HIMPAUDI Kaltim, 2026).

Disparitas pendapatan yang sangat lebar antar kabupaten/kota ini mengonfirmasi bahwa jaminan kesejahteraan guru di tingkat daerah masih bergantung pada kemauan politik (*political will*) penguasa local (Bushati, 2018). Selain perjuangan finansial, perlindungan hukum terhadap profesi guru juga menjadi fokus perhatian yang diinisiasi oleh organisasi melalui pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) internal untuk mengantisipasi potensi kriminalisasi guru (Arifa, 2019). Instrumen proteksi ini memberikan rasa aman yang sangat dibutuhkan oleh guru dalam menjalankan tugas pedagogis mereka tanpa rasa cemas (Nurahillah et al., 2025). Secara konseptual, intervensi advokasi anggaran yang dilakukan oleh HIMPAUDI Kaltim terbukti mampu menstabilkan angka perputaran guru (*teacher turnover*) akibat demotivasi finansial.

Kajian tata kelola pendidikan ini menegaskan bahwa tingkat kejenuhan kerja guru usia dini berkorelasi langsung dengan rendahnya penghargaan finansial dan tidak adanya jaminan perlindungan profesi (Arifa, 2019; Fitrianto & Fenty Anggriani Bintoro, 2019; Young et al., 2025). Oleh karena itu, HIMPAUDI Kaltim kini tengah mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan PAUD Satu Atap yang mewajibkan desa mengalokasikan persentase tertentu dari Dana Desa untuk pos insentif pendidik. Melalui kolaborasi bersama dinas pemberdayaan masyarakat, sistem penganggaran permanen ini dirancang untuk menggantikan ketergantungan pada dana hibah daerah yang bersifat fluktuatif (Ammar et al., 2026). Capaian regulasi lokal ini diharapkan dapat memperkuat fondasi makro tata kelola guru demi pencapaian visi Indonesia Emas 2045 (Luiza et al., 2026; Matsvange et al., 2021).



Challenges in Policy Implementation

Pelaksanaan program strategis yang dirancang oleh HIMPAUDI Kalimantan Timur senantiasa berhadapan dengan labirin hambatan struktural dan geografis yang sangat masif. Karakteristik wilayah Kalimantan Timur yang didominasi oleh hutan tropis, aliran sungai besar, dan kepulauan terluar menciptakan jarak spasial yang ekstrem antar satuan pendidikan (BPS-Statistics Kalimantan Timur Province, 2025). Biaya logistik untuk mengirimkan tim pelatih diklat ke wilayah hulu atau pesisir kepulauan sering kali menelan anggaran operasional yang sangat besar (Fauzi et al., 2024). Keterbatasan aksesibilitas fisik ini menyebabkan distribusi ilmu pengetahuan dan pembaharuan metode mengajar berjalan lambat, sehingga memicu terjadinya ketimpangan kualitas pengajaran antara wilayah pusat kota dan pedalaman (Fitrianto & Fenty Anggriani Bintoro, 2019; Ringgi Allo et al., 2025). Informan kunci menggambarkan potret hambatan riil yang dialami oleh para pengurus di lapangan ketika harus menembus batas geografis demi menjalankan misi peningkatan mutu organisasi. Terkait kendala transportasi dan akses internet ini, beliau memaparkan:

"Tantangan geografis kita di Kaltim ini luar biasa ekstrem. Untuk mengadakan monitoring ke daerah 3T di pedalaman Kutai Barat atau Mahakam Ulu, pengurus kami harus naik kapal ketinting berhari-hari dengan biaya jutaan rupiah. Belum lagi di sana blank spot, tidak ada sinyal. Pusat mewajibkan laporan serba digital lewat aplikasi Dapodik, padahal guru-guru di pelosok harus naik perahu dulu ke pusat kecamatan hanya untuk cari sinyal internet." (Wawancara dengan Ketua HIMPAUDI Kaltim, 2026).

Hambatan infrastruktur tersebut memperlihatkan bahwa model digitalisasi pendidikan yang dirancang oleh pemerintah pusat mengasumsikan seluruh wilayah di Indonesia telah memiliki fasilitas teknologi yang mapan (Manggalih et al., 2025; Setiawan et al., 2026). Kondisi ini memicu munculnya fenomena digital *divide* yang memperparah ketimpangan kualitas antara PAUD urban dan rural (Fauzi et al., 2024). Tantangan ini diperumit oleh adanya perlakuan diskriminatif dari sebagian oknum birokrasi dinas pendidikan lokal yang masih memprioritaskan alokasi pembinaan anggaran untuk guru-guru TK formal. Keterbatasan anggaran internal organisasi yang hanya bersumber dari iuran swadaya semakin membatasi ruang gerak HIMPAUDI Kaltim untuk mendirikan pusat belajar digital di pelosok.

Seluruh rangkaian hambatan multidimensional ini semakin eskalatif seiring dengan percepatan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (Ammar et al., 2026). Kehadiran IKN menuntut wilayah penyangga untuk meningkatkan standar mutu PAUD non-formal secara instan agar mampu bersaing dengan lembaga-lembaga ekspatriat internasional (Budiman et al., 2026). Apabila pemerintah pusat tidak segera merumuskan kebijakan afirmatif yang mengintegrasikan penguatan infrastruktur fisik dan dukungan finansial bagi organisasi profesi lokal, maka visi pemerataan mutu pendidikan anak usia dini di era IKN akan sulit direalisasikan. Diperlukan sinkronisasi tata kelola yang inklusif agar peran mediasi HIMPAUDI Kaltim mampu menghasilkan dampak pengabdian yang optimal (Anirwan et al., 2024; Sungwa, 2025).

4. CONCLUSION

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kalimantan Timur bukan sekadar sebuah wadah berkumpulnya para praktisi, melainkan telah membuktikan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan anak usia dini. Melalui fungsi mediasi kebijakan, organisasi ini mampu menerjemahkan regulasi makro yang kaku dari pusat seperti Kurikulum Merdeka menjadi program kerja mikro yang aplikatif bagi para pendidik di lapangan. Eksistensi jejaring profesional ini secara riil berhasil mengisi kekosongan peran birokrasi, terutama dalam mengatasi kelambatan diseminasi informasi dari dinas terkait dan keterbatasan kuota pelatihan resmi dari pemerintah. Menggerakkan program Diklat Berjenjang secara mandiri dan mengoptimalkan forum gugus di tingkat kecamatan, organisasi ini menjadi pilar utama yang menjaga keberlanjutan mutu pembelajaran sekaligus menjaga stabilitas motivasi kerja guru non-formal di akar rumput.



Besarnya kontribusi mandiri organisasi ini membawa implikasi penting bagi rekonstruksi tata kelola kebijakan pendidikan di tingkat daerah, khususnya dalam menyongsong transisi geopolitik seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah daerah direkomendasikan untuk mengubah pola perumusan kebijakan yang semula bersifat satu arah dari atas ke bawah (*top-down*) menjadi model kemitraan kolaboratif yang inklusif. Organisasi profesi harus dilibatkan secara formal sejak tahap perencanaan anggaran dan penyusunan regulasi lokal, seperti Peraturan Daerah, agar kebijakan yang dilahirkan dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Sinkronisasi data dan pengakuan legal terhadap jalur pelatihan mandiri yang diselenggarakan oleh organisasi profesi menjadi kebutuhan mendesak untuk menuntaskan kesenjangan kualifikasi akademik serta ketimpangan insentif finansial antara wilayah perkotaan dan pedalaman.

Penelitian ini terbatas dalam ruang lingkup yang hanya memotret perspektif internal dari satu organisasi profesi di satu wilayah provinsi. Fokus pengumpulan data yang berpusat pada pengurus tingkat wilayah menyebabkan variasi hambatan sosiologis dan tantangan infrastruktur spesifik yang dihadapi oleh satuan PAUD kecil di pelosok belum terpetakan secara proporsional. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif tingkat pengaruh langsung dari besaran insentif daerah terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru di dalam ruang kelas. Keterbatasan tersebut membuka peluang besar bagi penelitian masa depan untuk menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) atau melakukan studi komparatif antar-provinsi guna menghasilkan model advokasi kebijakan yang lebih luas dan dapat digeneralisasikan pada skala nasional.

5. REFERENCES

- Ammar, M. A., Budihardjo, M. A., Chegenizadeh, A., & Nikraz, H. (2026). Building a sustainable future for Indonesia's new capital, the Nusantara capital city (IKN). *Sustainable Futures*, 11, 101718. <https://doi.org/10.1016/J.SFTR.2026.101718>
- Anirwan, A., Aljurida, A. M. A., & Baharuddin, T. (2024). Developing a New Capital City (IKN) In Indonesia: A Thematic Analysis. *Policy & Governance Review*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.30589/PGR.V8I1.863>
- Arifa, F. (2019). Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Judisial*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.22212/ASPIRASI.V7I1.1084>
- Aznem, A., & Hanim, Z. (2025). Strategi Pendidikan di Kalimantan Timur: Menyongsong Era Digital dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Pendas Mahakam: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 10(1), 6–13. <https://jurnal.fkip-uwgm.ac.id/index.php/pendasmahakam/article/view/2019>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- BPS-Statistics Kalimantan Timur Province. (2025). Kalimantan Timur Province in Figures 2025. *Kalimantan Timur Province in Figures 2025*, 1–802. <https://kaltim.bps.go.id/publication/2023/02/28/7a58231d5aa2f5a7b4d5c36a/provinsi-kalimantan-timur-dalam-angka-2023.html>
- Budiman, B., Azainil, A., Haeruddin, H., Komariyah, L., Masruhim, A., & Haryaka, U. (2026). Achievement-Based School Principal Leadership in Improving the Quality of Education at the Buffer Schools of the Nusantara Capital City (IKN). *Borneo Educational Journal (Borju)*, 8(1), 36–53. <https://doi.org/10.24903/BEJ.V8I1.2291>
- Bushati, A., & <https://independent.academia.edu/AngelaBushati>. (2018). Tracing the Global Child: Global Politics Shaping Local Childhoods. *European Journal of Education*, 1(3), 68. <https://doi.org/10.26417/EJED.V1I3.P68-72>
- Creswell, J. W., Shope, R., Clark, V. L. P., & Green, D. O. (2006). Spring 2006 How Interpretive Qualitative Research Extends Mixed Methods Research. *RESEARCH IN THE SCHOOLS Mid-South Educational Research Association*, 13(1), 1–11.



- Danim, S., Putri Kartiwi, A., & Susanto, E. (2022). The Effectiveness of the Basic Level of Combination Online Education and Training for Early Childhood Education Teachers. *Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i1.3302>
- Education at a Glance 2020 OECD INDICATORS. (2020). <https://doi.org/10.1787/69096873-en>
- Fauzi, A., Gede Mulawarman, W., Basataka Usfandi Haryaka, J., Sakti Natavia, D., Haryaka, U., Pendidikan dan Kebudayaan, D., & Mulawarman, U. (2024). PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMFASILITASI PENGGUNAAN MEDIA SIBER UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL MASYARAKAT DI KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal Basataka (JBT)*, 7(2), 899–909. <https://doi.org/10.36277/BASATAKA.V7I2.570>
- Fitrianto, Y., & Fenty Anggriani Bintoro, R. (2019). PELAKSANAAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI KALIMANTAN TIMUR (STUDI KASUS DI KOTA SAMARINDA, KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DAN KABUPATEN KUTAI TIMUR). *JURNAL RISET PEMBANGUNAN*, 2(1), 36–46. <https://doi.org/10.36087/JRP.V2I1.47>
- Fitriyah, F., Yuwono, T., & Manar, D. G. (2025). *The Impact of the Development of the Indonesian National Capital (IKN) on Local Communities* (pp. 142–150). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-436-5_12
- Galang Harfianto, N., & Solekah, atus. (n.d.). *PERAN ORGANISASI PROFESI KEPENDIDIKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN*.
- Heru, A., Chatra, E., Arif, E., Sosial, J. I., & Humaniora, D. (n.d.). *Praktik Komunikasi Pada Advokasi Kebijakan Nasional Pendidikan Di Daerah (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Batam)*. Retrieved May 22, 2026, from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Kuckartz, U. (2014). Qualitative Text Analysis: A Guide to Methods, Practice & Using Software. *Qualitative Text Analysis: A Guide to Methods, Practice & Using Software*. <https://doi.org/10.4135/9781446288719>
- Kurniawan, S., Zainul, A., & Arif, I. (2025). Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Tuban. *Jurnal E-MAS (Edukasi Dan Pembelajaran Anak Usia Dini)*, 1(2), 47–56. <https://doi.org/10.64690/E-MAS.V1I2.262>
- Latifah, S., Widiastuti, N., Darul, K., Padalarang, F., & Siliwangi, I. (2018). PERAN HIMPAUDI DALAM MENINGKATKAN MANAJEMEN PAUD DI KOBER DARUL FAROHI. *Jurnal Comm-Edu*, 1.
- Luiza, A., Sá, F., & Luiza De França Sá, A. (2026). Educational Innovation and Teachers' Human Development. *Human Arenas 2026*, 1–20. <https://doi.org/10.1007/S42087-025-00547-1>
- Manggalih, A., Sulung, P. N., & Gufron, M. (2025). Peran Organisasi PGRI dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Era Transformasi Pendidikan Digital. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 6(2), 176–181. <https://doi.org/10.30596/JPPP.V6I2.28319>
- Manley, H., Tu, E. N., Reardon, T., & Creswell, C. (2023). The relationship between teachers' day-to-day classroom management practices and anxiety in primary school children: A systematic review. *Review of Education*, 11(1), e3385. <https://doi.org/10.1002/REV3.3385;ISSUE:ISSUE:DOI>
- Markuri, P., & Fakhri, J. (2023). Efektifitas Organisasi Himpaudi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bandar Lampung. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare>
- Matsvange, M., Mudimba, C., & Tholakele, M. L.-A. S. (2021). The Impact of Incentives on Early Childhood Teachers' Proficiency in Lubombo Region, Eswatini: Incentives and Teachers' Proficiency. *International Journal of Educational Development in Africa*, 6(1), 17 pages-17 pages. <https://doi.org/10.25159/2312-3540/9267>



- Moss, P., & Urban, M. (2017). The OECD's International Early Learning Study: what happened next. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 18(2), 250–258. <https://doi.org/10.1177/1463949117714086>
- Noble, H., & Smith, J. (2015). Issues of validity and reliability in qualitative research. *Evidence-Based Nursing*, 18(2), 34–35. <https://doi.org/10.1136/EB-2015-102054>
- Nurahillah, N., Munawar, M., & Muhammad, M. (2025). Tantangan dan Solusi Kepemimpinan di Lembaga PAUD: Menjawab Kebutuhan Pendidikan Modern. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 299–306. <https://doi.org/10.29303/JIPP.V10I1.2975>
- Nurapriani, R., Yanuarsari, R., Ruswandi, A., Suhendraya Muchtar, H., Luqmanul Hakim, L., & Islam Nusantara, U. (2019). *Indonesian Vocabulary Learning for Early Childhood Using Paper Puppet Media*. <https://doi.org/10.4108/eai.19-10-2018.2281317>
- Palupi, R. E., & Sugito. (2025a). From Insecurity to Agency: Professional Competency Development among Non-Formal Early Childhood Educators in Indonesia. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 10(1), 171–186. <https://doi.org/10.14421/JGA.2025.101-14>
- Palupi, R. E., & Sugito. (2025b). From Insecurity to Agency: Professional Competency Development among Non-Formal Early Childhood Educators in Indonesia. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 10(1), 171–186. <https://doi.org/10.14421/JGA.2025.101-14>
- Penelitian, S., Kantor, D., Perwakilan, D., Partai, D., Nasional, A., & Langkat, K. (2023). *Advokasi Kebijakan terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Melalui Program Partai Amanat Nasional di Kabupaten Langkat*. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21082>
- Profesionalisme, M., Kecamatan, G. Di, Kabupaten, W., Lilik, M., Guru, Y., Sitirejo, S., Wagir, K., & Malang, K. (2013). Implementasi Kebijakan Organisasi PGRI dalam Mengembangkan Profesionalisme Guru di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan*, 1(1), 30–36. <https://www.neliti.com/publications/276394/>
- Ringgi Allo, A., Dewi, S., Basataka Laili Komariyah, J., Dwiyono, Y., & Komariyah, L. (2025). KESEJAHTERAAN GURU DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PENDIDIKAN ANALISIS KOMPARATIF ANTARA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal Basataka (JBT)*, 8(2), 1491–1498. <https://doi.org/10.36277/BASATAKA.V8I2.1114>
- Setiawan, A., Wijayanti, D., Setiadi, A., Satriani Nanda Rukma, A., & Hikma, M. (2026). Digital Technology-Based Education Transformation in The Capital of The Archipelago. In *JEMBA: Journal of Development Economics, Management and Business, Accounting* (Vol. 6, Number 1). <https://kaltim.bps.go.id>
- Sulistiani, I. (n.d.). *The Evaluation of Enhancement Competency Policy through Diklat Berjenjang for Early Childhood Teachers*. Retrieved May 20, 2026, from www.ijassjournal.com
- Sungwa, R. S. (2025). Global perspectives on early childhood education policy: a bibliometric study. *Cogent Education*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2494460>
- Tabo, D. A., Maksum, D. A., Pantuko, M., Saleh, S. A., Ruhban, S., & Indriani, N. P. I. (2025). Kebijakan Pendidikan dan Advokasi: Membangun Sinergi antara Dinas Pendidikan dan Masyarakat di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 1(1), 88–97. <https://doi.org/10.63822/F28ETT10>
- Taiyu, L., Chakrabort, A., & Banerjee, S. (2025). A RESEARCH ON ANALYSING THE IMPACT OF INCENTIVE MECHANISM AND TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL MANAGEMENT. *CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS*, 26(1), 190–198. <https://doi.org/10.61841/11A4HM32>
- Ulfah, S. M., Anisah, A., Anisia, I. W., Ridwan, R., & Bangsawan, I. (2023). Efektivitas Diklat Berjenjang Tingkat Dasar untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 6415–6427. <https://doi.org/10.31004/OBSESI.V7I5.4311>



- UNESCO. (2021). *Global Report on Early Childhood Care and Education: The right to a strong foundation* | UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/global-report-early-childhood-care-and-education-right-strong-foundation>
- Young, J. S., Satyawati, S. T., Dwikurnaningsih, Y., Artikel, R., Kunci, K., Anak, P., Dini, U., Guru, P., & Guru, P. P. (2025). Peran Guru Berubah, Profesionalisme Berkembang: Masa Depan Pendidikan Korea dan Indonesia: Peran Guru Berubah, Profesionalisme Berkembang: Masa Depan Pendidikan Korea dan Indonesia. *AUDIENSI: Jurnal Pendidikan Dan Perkembangan Anak*, 4(1), 44–57. <https://doi.org/10.24246/AUDIENSI.VOL4.NO12025PP44-57>
- Yunara, S. E. (2022). Peran Literasi Digital dalam Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(1), 49–60. <https://doi.org/10.30870/JPPPAUD.V9I1.13480>
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric Methods in Management and Organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>